

Dr. Iskandar Agung, M.Si, dkk



# MENGEMBANGKAN PROFESIONALITAS GURU

Upaya Meningkatkan Kompetensi dan  
Profesionalisme Kinerja Guru



VI. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PASCA SERTIFIKASI GURU Oleh: Tatang Sunendar Iskandar .....	141
VII. PERAN DESENTRALISASI DAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA ASING DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU EKONOMI DI PROPINSI RIAU Oleh: Jullina .....	170
VIII. PENGARUH FAKTOR KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, KARAKTERISTIK GURU, DAN PEMANFAATAN FASILITAS BELAJAR DI SEKOLAH OLEH GURU TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA Oleh: Ikhyia Uthamudin .....	203
IX. SINERGITAS KEMITRAAN ANTARA LIMP DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU PASCA SERTIFIKASI Oleh: Nani Setiawati .....	233
X. DESENTRALISASI PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MODEL DBE-2 Oleh: Mutsyuhito Solin .....	252

XI. MODEL PEMBELAJARAN BERVISI KEWIRAUSAHAAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL Oleh: Achmad Machit .....	287
XII. PERAN KEPALA SEKOLAH DALAM PENILAIAN KINERJA GURU DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN Oleh: Abdul Rachman .....	316

**PERAN DESENTRALISASI DAN KEMITRAAN DENGAN LEMBAGA ASING  
DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU EKONOMI DI  
PROPINSI RIAU**

**Julina**

**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Pekanbaru  
Julina22@ymail.com**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran desentralisasi dan kemitraan dengan lembaga asing dalam meningkatkan profesionalisme guru di Propinsi Riau. Subjek penelitian adalah guru-guru ekonomi yang pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Council for Economic Education (CEE) dari Amerika Serikat bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Pendidikan Ekonomi Universitas Riau (PPPE-UNRI). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa desentralisasi memang memiliki sisi positif dan negatifnya. Terdapat beberapa upaya agar sisi positif desentralisasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan. Selain itu kerjasama dengan lembaga asing juga terbukti mampu meningkatkan profesionalisme guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi dan pedagogi yang diberikan dalam pelatihan yang bekerjasama dengan lembaga asing ini sangat sesuai bagi kebutuhan tugas mereka. Untuk tingkat pemahaman materi, materi ekonomi mikro lebih dipahami daripada ekonomi makro, namun untuk kemungkinan penerapannya di kelas, materi ekonomi makro lebih tinggi kemungkinannya untuk diterapkan. Selain itu, peserta pelatihan juga sangat memperoleh manfaat dari sisi materi dan pedagogi yang disampaikan. Desentralisasi dan kerjasama kemitraan dengan lembaga asing dalam penyelenggaraan pelatihan adalah sebagian upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah daerah melalui kewenangan yang dimiliki, memiliki peran penting untuk peningkatan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di daerahnya. Investasi yang baik dalam sumber daya manusia melalui pendidikan adalah hal penting yang harus dilakukan untuk kemajuan suatu daerah dan negara.

**Kata Kunci:** Desentralisasi Pendidikan, Kemitraan Lembaga Asing, Profesionalisme Guru

## **A. PENDAHULUAN**

Peningkatan profesionalisme guru adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan yang sudah pasti akan menuntut dilakukannya penyesuaian terhadap kemampuan atau keahlian yang dimiliki sebelumnya. Perkembangan teknologi, perubahan pola pikir, perubahan

peraturan pemerintah, perubahan budaya dan kebiasaan, semuanya dapat mengakibatkan lingkungan yang dihadapi oleh guru tidak lagi sama seperti dulu. Peserta didik sekarang, boleh dikatakan sebagai generasi digital dimana perkembangan teknologi membuat mereka dapat mencari sumber informasi lebih cepat, lebih beragam, dan lebih mudah dari masa sebelumnya. Perkembangan teknologi ini selanjutnya mempengaruhi pola pikir, budaya, dan perilaku siswa. Berbagai perubahan ini tentu saja harus menjadi perhatian bagi guru agar tugas utamanya menghasilkan generasi berkualitas dapat dicapai secara maksimal. Jangan sampai kemampuan guru ini jauh tertinggal dari perkembangan siswa. Oleh karena itu pengetahuan guru mengenai materi yang akan diajarkan, metode pembelajaran, harus senantiasa ditingkatkan.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru. Adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan sertifikasi sejak tahun 2006 termasuk salah satu pemicu perubahan perilaku guru. Dengan sistem portofolio, guru termotivasi mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan. Selanjutnya apabila guru dinyatakan tidak lolos sertifikasi melalui jalur portofolio, maka guru diwajibkan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Sejak tahun 2011, pemerintah mengubah peraturan untuk sertifikasi dengan menghapuskan sistem portofolio dan hanya menitikberatkan pada PLPG sebagai syarat mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Selain pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme guru tersebut. Salah satu pelatihan yang pernah dilakukan di Pekanbaru adalah workshop pendidikan ekonomi yang diselenggarakan oleh Council for Economic Education (CEE) dari Amerika Serikat. CEE adalah salah satu LSM dari Amerika Serikat yang sangat memberikan perhatian pada pendidikan ekonomi pada masyarakat sedini mungkin. Untuk Provinsi Riau, CEE bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Pendidikan Ekonomi Universitas Riau (PPPE-UNRI). Sejak tahun 2003, CEE telah mengirimkan peserta pelatihan dari Indonesia ke berbagai negara untuk dididik sebagai pelatih. Selanjutnya para alumni CEE ini mendistribusikan materi dan pedagogi yang diperoleh dalam bentuk workshop pendidikan ekonomi ke guru-guru ekonomi yang ada di daerahnya masing-masing.

Demikian seterusnya, diharapkan para guru yang telah mengikuti workshop ini akan menggunakan keterampilan yang diperoleh kepada para siswa di sekolah.

Peningkatan profesionalisme guru ini juga dimungkinkan tercapai dengan diberlakukannya desentralisasi pendidikan. Dalam desentralisasi pendidikan, pemerintah pusat lebih berperan dalam menghasilkan kebijaksanaan mendasar (menetapkan standar mutu pendidikan secara nasional), sementara kebijaksanaan operasional yang menyangkut variasi keadaan daerah didelegasikan kepada pejabat daerah bahkan sekolah. Pada praktek pengajaran di kelas, guru dapat berimprovisasi dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada serta karakteristik siswa yang dihadapi. Dari sudut pandang manajemen, desentralisasi pendidikan sekolah dapat memperpendek jarak pengelolaan pendidikan, baik dari sisi perencanaan maupun pembiayaan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan penyediaan layanan pendidikan yang efisien. Dipercayai bahwa desentralisasi dapat meningkatkan profesionalisme guru sehingga pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran desentralisasi dan kemitraan dengan lembaga asing terhadap peningkatan profesionalisme guru? Pembahasan membatasi pada kerjasama kemitraan lembaga asing CEE dengan PPPE-UNRI dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan deskriptif kuantitatif

## **B. PENDEKATAN KONSEPTUAL**

### **1. Desentralisasi Pendidikan**

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian otoritas pemerintah pusat ke daerah, untuk mendistribusikan beban pemerintah pusat ke daerah sehingga daerah dan masyarakatnya ikut menanggung beban tersebut (Ravik, 2005). Pemberlakuan UU otonomi daerah yang dimulai dengan diterapkannya UU nomor 22 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dengan diserahkannya sejumlah kewenangan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam berbagai aspek pembangunan di

Indonesia, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Berdasarkan pasal 10 ayat (3) UU nomor 32 tahun 2004, urusan-urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: pertama politik luar negeri, kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat yustisi, kelima moneter dan fiskal nasional, keenam agama. Selain urusan-urusan tersebut, semua urusan telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota. Pelimpahan wewenang kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagaimana termuat dalam pasal 12 ayat(1) UU nomor 32 tahun 2004 bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu, dikeluarkan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti, serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Jumlah kewenangan yang begitu besar tersebut membawa perubahan struktur dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan stakeholder didalamnya. Jika pada masa sebelumnya diberlakukannya otonomi daerah, stakeholder pendidikan sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, maka di era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakeholder akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Harahap, 2012).

Menurut UNESCO seperti dikutip McGinn & Welsh (1999) terdapat tiga faktor utama yang mendorong peningkatan kepentingan dalam desentralisasi yang dimulai sekitar tahun 1970an. Pertama, perdebatan ekonomi-politik pada tahun 1970an dan 1980an yang menghasilkan disintegrasi konsensus Keynesian yang sangat menyukai pemerintahan terpusat. Hasilnya adalah reformulasi dan pengurangan peran pemerintah pusat dan peningkatan peran pasar. Globalisasi keuangan dan ekonomi selanjutnya semakin memperlemah peran pemerintah pusat. Di satu sisi, organisasi supranasional telah mengurangi kedaulatan

nasional. Pada sisi lain, pergeseran pembuatan keputusan berbasis pasar telah memperkuat kelompok-kelompok lokal. Hal ini semakin membuat pemerintah kesulitan mendapatkan dana untuk program-program sosial. Pendukung desentralisasi mencakup peran privatisasi dan dorongan dari LSM. Artinya, sebuah paradigma ekonomi-politik yang baru telah muncul. Pada saat yang sama, angka partisipasi sistem pendidikan diseluruh dunia telah meningkat dua sampai tiga kali lipat. Peningkatan jumlah guru dan siswa telah melebihi kapasitas birokrasi terpusat untuk mempertahankan kualitas. Peningkatan ketidakpuasan publik telah menghasilkan tekanan untuk menggeser pembuatan keputusan pada kelompok lokal. Terakhir, munculnya teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan pencapaian sistem pengawasan yang tinggi pada manajemen desentralisasi. Paradigma baru dalam manajemen yang menekankan perhatian pada output dibandingkan input meningkatkan pentingnya memperkuat kapasitas lokal untuk pembuatan keputusan. Secara lebih terperinci, tujuan desentralisasi dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendidikan secara langsung, antara lain melalui peningkatan jumlah dan kualitas input ke sekolah, relevansi dan keinovatifan program, menyelaraskan isi program dengan minat lokal, mengurangi ketidaksamaan akses terhadap pendidikan berkualitas, dan meningkatkan hasil pembelajaran.
- 2) Meningkatkan operasi sistem pendidikan, misalnya dengan meningkatkan efisiensi alokasi dan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan kesesuaian program dengan persyaratan di dunia kerja, meningkatkan penggunaan informasi tentang isu-isu, masalah, atau inovasi (sehingga meningkatkan efisiensi)
- 3) Merubah sumber dan jumlah pendanaan yang tersedia untuk pendidikan, misalnya meningkatkan keseluruhan jumlah uang yang dibelanjakan untuk pendidikan, menggeser sumber pendanaan dari satu kelompok sosial, ke kelompok sosial lainnya.
- 4) Memberikan manfaat pada pemerintah pusat, terutama melalui membebaskan pemerintah pusat dari masalah-masalah politik eksternal

dan birokrasi internal, membebaskan pemerintah pusat dari beban keuangan, meningkatkan legitimasi politik pemerintah pusat, mengurangi korupsi pada tingkat nasional

- 5) Memberikan manfaat pada pemerintah lokal, terutama melalui meningkatkan pendapatan untuk pendidikan yang tersedia bagi pemerintah lokal, meningkatkan kapasitas pemerintah lokal, meningkatkan daya tanggap pemerintah pusat pada permintaan pemerintah lokal, redistribusi kekuasaan politik.

Dari perspektif manajemen, desentralisasi pendidikan yang bersifat administratif dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, jika dalam sistem sentralisasi mekanisme implementasi kebijakan dilakukan di pusat dengan melibatkan unsur birokrasi yang lamban dan gemuk, dalam sistem desentralisasi, pelaksanaan kebijakan menjadi efisien karena dilakukan dengan cepat oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pada saat yang sama, motivasi untuk meningkatkan produktivitas akan lebih dirasakan oleh para pengelola pendidikan di daerah, karena desentralisasi pendidikan ikut merangsang prakarsa proaktif pengelola pendidikan dalam menjalankan pendidikan di daerahnya. Namun juga harus digarisbawahi bahwa desentralisasi pendidikan mungkin saja dapat menghasilkan dampak negatif yang tidak diharapkan. Pada beberapa kasus dalam kebijakan desentralisasi, wewenang pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah dirasa begitu besar. Implikasinya, pembangunan dan investasi bidang pendidikan di daerah sangatlah tergantung pada visi besar pembangunan pemerintah daerah itu sendiri. Maka menjadi kerugian jika pemerintah di daerah lebih mengutamakan keuntungan pembangunan jangka pendek seperti infrastruktur jalan dan irigasi, ketimbang investasi jangka panjang seperti pendidikan (Paqueo & Lammert, 2000 dalam Mustaming, 2011).

Potensi pendukung desentralisasi pendidikan lainnya yang sejalan dengan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan adalah banyaknya sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menggantungkan pada biaya dari pemerintah, misalnya sekolah-sekolah agama yang diselenggarakan



masyarakat Islam. Adanya sekolah seperti ini diakui pula oleh World Bank (Mark Bray, 1996) sebagai salah satu kekuatan pendukung bagi desentralisasi pendidikan (Muhidin). Kesuksesan desentralisasi dalam jangka panjang juga ditentukan oleh profesionalisme guru.

## **2. Kemitraan dengan Lembaga Asing**

Council for Economic Education (CEE), sebelumnya bernama National Council on Economic Education (NCEE), adalah lembaga swadaya masyarakat dari New York Amerika Serikat yang memperjuangkan peraturan dan kebijakan dibidang pendidikan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Tujuannya ingin mengembangkan program-program profesional yang berkualitas tinggi agar guru efektif dalam mengajar, juga siswa memiliki standar internasional yang kompetitif. Sejak tahun 2003, CEE telah melatih sekitar 116 orang guru dan dosen dari Indonesia untuk dilatih menjadi pelatih bidang ekonomi. 65 orang diantaranya mengikuti pelatihan di beberapa negara di luar negeri. Semua peserta mengikuti empat kali sesi pelatihan yang diselenggarakan dalam bulan yang berbeda yang meliputi dasar-dasar ekonomi, ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi internasional. Peserta yang telah mengikuti pelatihan langsung dari tim instruktur CEE, selanjutnya diharapkan memberikan pelatihan kepada guru-guru ekonomi di daerahnya masing-masing terkait dengan materi dan pedagogi yang telah diperoleh selama pelatihan.

Di Indonesia, CEE memiliki perpanjangan tangan yaitu Indonesian Council on Economic Education (ICEE), yang berkedudukan di Jakarta. Untuk Propinsi Riau, CEE bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Pendidikan Ekonomi Universitas Riau (PPPE-UNRI) di Pekanbaru. PPPE adalah suatu unit kegiatan di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang berdiri pada bulan Agustus 2004. Organisasi ini berbasis perguruan tinggi yang mengemban peran sebagai pusat pengembangan pendidikan ekonomi di wilayah Propinsi Riau. Sejak

tahun 2005, PPPE telah menyelenggarakan workshop pembelajaran ekonomi untuk guru ekonomi se Propinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan jumlah peserta lebih kurang sebanyak 325 guru.

### **3. Profesionalisme Guru**

Secara tradisional, terdapat tiga konsep penting dalam memandang profesional. Konsep tersebut meliputi pengetahuan, otonomi, dan tanggung jawab. Hal ini karena seorang profesional menghadapi situasi yang kompleks dan tidak dapat diprediksi yang membutuhkan pengetahuan khusus. Untuk dapat menerapkan pengetahuan ini, dibutuhkan otonomi dalam membuat penilaian mereka sendiri. Dengan adanya otonomi ini, penting bahwa mereka harus bertanggungjawab dalam bertindak (Furlong, *et all.* 2000).

Pada prakteknya, seorang guru tidak hanya semata-mata mengajarkan apa yang terdapat dalam kurikulum. Mereka mendefinisikan, mengembangkannya, dan menginterpretasikan juga. Apa yang dipikirkan oleh guru, yang dipercayai, dan yang dilakukan di kelas, pada akhirnya akan membentuk jenis pembelajaran yang didapat siswa. Bagi sebagian orang, meningkatkan proses pengajaran terutama dilakukan dengan mengembangkan metode pengajaran yang lebih baik. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa pengembangan seorang guru dan proses pengajarannya melibatkan lebih dari sekedar memberikan mereka trik-trik baru. Bagi seorang guru, apa yang terjadi di dalam kelas sangat berkaitan dengan apa yang terjadi diluar kelas. Kualitas pengajaran, variasi metode pengajaran, fleksibilitas kegiatan didalam kelas akan sangat berkaitan dengan pertumbuhan profesional guru (Hondkinson, 1997).

Guru yang memiliki kompetensi sebagai pendidik akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembelajaran dibanding dengan guru yang tidak memiliki kompetensi. Keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, usaha meningkatkan kualitas pendidikan harus dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas adalah guru yang profesional dalam melaksanakan tugas

pembelajaran. Guru yang profesional mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran, serta menilai hasil pembelajaran. Untuk itu seorang guru yang profesional harus menguasai bahan ajar, memahami karakteristik peserta didik, dan terampil dalam memilih metode pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan profesionalisme guru seperti yang dibahas di atas adalah (Mardapi, 2012):

- 1) Melalui pelatihan yang efektif, setelah pelatihan harus ada umpan balik berupa ujian.
- 2) Magang pada guru yang profesional
- 3) Membaca buku atau hasil penelitian tentang guru yang profesional
- 4) Melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan.
- 5) Melakukan refleksi diri terhadap perilaku yang ditampilkan di depan kelas dan di sekolah.
- 6) Melakukan evaluasi diri terhadap kinerja yang telah dicapai.

Profesi diukur berdasarkan kepentingan dan tingkat kesulitan yang dimiliki. Dalam dunia keprofesional kita mengenal berbagai terminologi kualifikasi profesi yaitu: profesi, semi profesi, terampil, tidak terampil, dan quasi profesi. Profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikasi keahlian haruslah dipandang perlu sebagai prasarat untuk menjadi guru profesional. Menurut Surya (2003) guru yang profesional harus menguasai keahlian dalam kemampuan materi keilmuan dan ketrampilan metodologi. Guru juga harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, lembaga dan organisasi profesi. Selain itu, guru juga harus mengembangkan rasa kesejawatan yang tinggi dengan sesama guru. Disinilah peran Perguruan Tinggi Pendidikan dan organisasi profesi guru (seperti PGRI) sangat penting. Kerjasama antar keduanya menjadi sangat diperlukan. Lembaga Pendidikan dalam memproduksi guru yang profesional tidak dapat berjalan sendiri, kecuali

selain harus bekerjasama dengan lembaga profesi guru, dan sebaliknya (Ravik, 2005).

### C. PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur, diketahui bahwa desentralisasi dapat meningkatkan profesionalisme guru yang berujung pada peningkatan hasil belajar siswa, dan secara umum peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri ada sisi negatif yang menyertai diberlakukannya desentralisasi ini. Adakalanya konsep tidak sebagus kenyataan. Tentu saja masalah yang ada tidak semestinya dibiarkan begitu saja. Nurullah dan Hafizoh (2012) menawarkan suatu solusi untuk mengatasi kelemahan desentralisasi ini yaitu melalui pengelola sekolah dimana posisinya paling dekat dengan siswa, yaitu peran kepala sekolah untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan disekolahnya. Kepala sekolah yang efektif dapat dilihat dari beberapa kriteria seperti mampu memberdayakan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, lancar dan produktif; dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada tingkatan yang lebih tinggi pemerintah daerah juga turut memiliki andil besar sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya dan kemajuan pendidikan. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga visi dan misi pemerintah daerah akan mempengaruhi apakah pengelolaan keuangan lebih dititikberatkan pada infrastruktur atau pendidikan. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk menyediakan pendidikan bagi semua orang, dan desentralisasi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Esensi desentralisasi dalam pendidikan itu sendiri adalah membuka akses untuk setiap anak memperoleh pendidikan tak peduli dimana mereka tinggal dan bagaimana status ekonomi mereka. Memastikan keadilan dan kesetaraan dalam penyediaan layanan pendidikan akan menjadi cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini (Samosir, 2008).

Alasan yang masuk akal dibelakang desentralisasi pendidikan adalah berdasarkan masalah ketidaksamaan informasi yang dapat disebabkan oleh politik, lokasi geografis, dan sering juga perbedaan budaya antara pemerintah pusat dengan

masyarakat. Pemerintah lokal sering dianggap lebih memahami dibandingkan pemerintah pusat yang jauh untuk merespon isu-isu pendidikan lokal, seperti pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan manajemen sekolah (Ornelas 2004 dalam Nasser-Ghodsi, 2006).

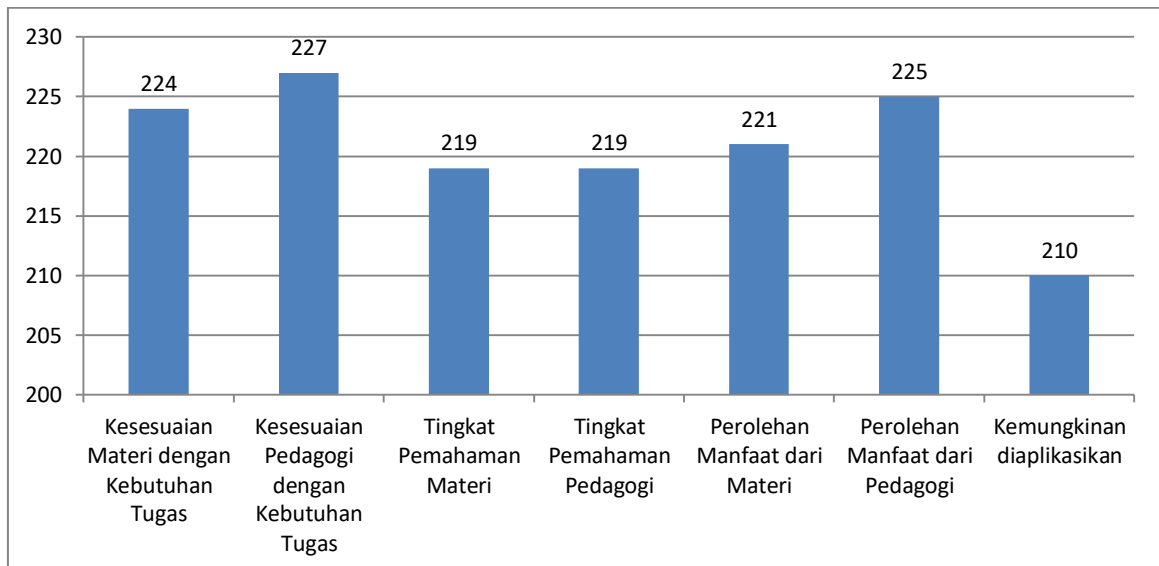
Selain desentralisasi, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dicapai melalui peningkatan profesionalisme guru. Setiap Guru harus memiliki kompetensi sesuai profesinya (ps 10 UU No.14/2005), meliputi:

1. Kompetensi pedagogik (unggul dalam hal; gaya/sikap dan metode mengajar).
2. Kompetensi Kepribadian (kepribadian Indonesia; Pancasila), (kepribadian Hindu; Panca Satya), sebagai teladan/idola di Sekolah “ing ngarso sungtulodo–ing madyo mangunkarso–tut wuri handayani” (bersikap kebapaan/keibuan) menjadi idola/teladan di rumah, dan dicontoh serta disegani di masyarakat.
3. Kompetensi Sosial (mencintai/menyayangi/disayangi, merasa memiliki atau dimiliki, menghargai, menghormati dan dihargai/ dihormati oleh lingkungan).
4. Kompetensi profesional (Guru cerdas ; intelek, emosi, spiritual). Cerdas intelek: mumpuni pada ilmu profesinya dan ilmu penunjang serta punya ketrampilan termasuk trampil mengelola hidup. Cerdas emosi: mampu membangkitkan semangat kerja/kompetisi, siswa dan tidak mudah marah, sedih, gembira berlebihan atau putus asa. Cerdas spiritual: mampu bekerja menggunakan hati nurani/ kata hati secara seimbang, kata hati yang mengendalikan pikiran dan emosi.

Lebih lanjut menurut Mardapi (2012), salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan profesionalisme guru adalah pemberian pelatihan secara berkala. Setiap tahun guru harus diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan yang terprogram dan sistematis. Pelatihan ini juga merupakan arena untuk penyegaran dan tukar menukar pengalaman antar guru. Kinerja guru ditentukan oleh banyak faktor, namun yang paling utama adalah profesionalisme guru. Guru yang profesional adalah yang menguasai bahan ajar, menguasai peserta didik, trampil dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran, dan menjadi tauladan dalam penampilan maupun ucapan di kelas dan di sekolah maupun di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan peningkatan profesionalisme guru ini, pada tahun 2010, CEE Amerika Serikat bekerjasama dengan PPPE-UNRI mengadakan workshop pembelajaran aktif bidang ekonomi mikro bagi guru ekonomi se Propinsi Riau dan Kepulauan Riau. Materi yang diberikan merupakan materi pelatihan yang diperoleh para tim instruktur ketika mengikuti pelatihan serupa yang diselenggarakan oleh CEE Amerika Serikat. Pada akhir workshop peserta diminta untuk memberikan pendapat mereka mengenai materi ekonomi dan pedagogi yang diberikan. Kuesioner tersebut meminta peserta memberikan penilaian yang berskala satu sampai sepuluh. Peserta yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner sebanyak 28 orang, sehingga skor terendah akan berjumlah 28 sedangkan skor tertinggi adalah 280. Kategori penilaian dibagi menjadi empat yang berarti sangat baik sampai sangat tidak baik. Hasil jawaban peserta dapat dilihat pada Grafik 1.

Grafik 1: Total Jawaban Peserta Mengenai Materi dan Metode Pembelajaran yang Disampaikan pada Workshop Pembelajaran Aktif Ekonomi Mikro 2010



Berdasarkan Grafik 1 dapat dilihat bahwa total nilai tertinggi dari penyelenggaraan workshop ini adalah kesesuaian pedagogi dengan kebutuhan peserta. Dengan mengumpulkan total nilai 227 penilaian peserta pada pelatihan ini masuk pada kategori sangat sesuai. Selanjutnya adalah pernyataan bahwa pedagogi yang diberikan bermanfaat bagi mereka di sekolah memperoleh total nilai 265 yang berarti masuk pada

kategori sangat bermanfaat. Beberapa pernyataan lain juga masuk pada kategori yang sangat baik kecuali untuk kemungkinan diaplikasikan di tempat bertugas. Total nilai untuk tingkat pemahaman materi adalah 210 yang masuk pada kategori mungkin akan diaplikasikan di tempat tugas. Berdasarkan kuesioner yang diisi peserta juga diketahui bahwa 89 persen peserta berniat mengaplikasikannya di tempat mereka bertugas kepada siswa dan rekan guru, serta kepada rekan mereka di MGMP. Sebagian peserta juga menginginkan adanya materi tentang akuntansi, mengingat di Indonesia pelajaran ekonomi yang diajarkan juga membahas akuntansi. Selain itu, peserta juga menginginkan pembahasan tidak hanya pada ekonomi mikro, tetapi juga ekonomi makro.

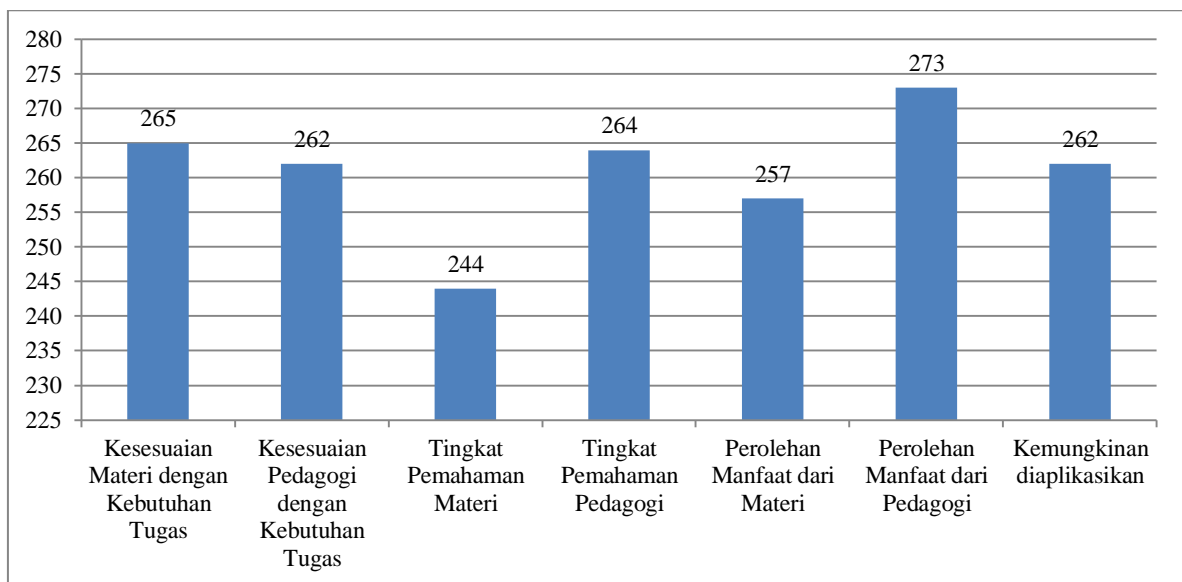
Terdapat beberapa penelitian empiris yang meneliti pengaruh pelatihan spesifik mata pelajaran tertentu terhadap peningkatan mutu baik guru maupun siswanya. Penelitian Goldhaber dan Brewer (1996) menemukan bahwa dalam mata pelajaran matematika dan sains, guru yang mendapatkan pelatihan spesifik pada mata pelajaran tertentu memiliki dampak pada skor nilai siswa pada mata pelajaran tersebut. Selain itu guru dengan tingkat pendidikan S1 atau S2 matematika, memiliki dampak yang positif dan signifikan pada prestasi belajar siswa. Begitu pula, guru dengan pendidikan S1 dalam mata pelajaran sains memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa.

Penelitian lain dilakukan oleh Gibbs & Coffey (2004). Artikel ini melaporkan suatu penelitian tentang keefektivan pelatihan guru yang dilakukan di 22 universitas di delapan negara. Sekelompok guru-guru yang dilatih dan siswa-siswa mereka dipelajari pada awal mereka dilatih dan setahun kemudian. Sekelompok guru baru yang tidak mendapatkan pelatihan dijadikan kelompok kontrol. Mereka dan siswanya juga diteliti dengan cara yang sama. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan positif pada kelompok guru yang dilatih, dan juga pada siswa mereka. Sebaliknya tidak terdapat perubahan, atau perubahan negatif dalam kelompok guru yang tidak mendapatkan pelatihan.

Untuk tahun 2011, CEE kembali bekerjasama dengan PPPE-UNRI mengadakan workshop lanjutan yaitu pembelajaran aktif ekonomi makro untuk guru ekonomi se Propinsi Riau. Hal ini merupakan salah satu respon dari tim instruktur PPPE-UNRI berdasarkan masukan peserta pada workshop tahun sebelumnya. Sama

seperti penyelenggaraan workshop pada tahun sebelumnya, di akhir workshop peserta juga diberikan kuesioner untuk evaluasi workshop yang memiliki kisaran nilai antara satu sampai sepuluh. Peserta yang berpartisipasi mengembalikan kuesioner berjumlah 33 sehingga nilai terendah adalah 33 dan nilai tertinggi 330. Berdasarkan kuesioner yang disebarkan, terlihat bahwa para peserta mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan workshop ini. Secara lebih terperinci, tanggapan peserta dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2: Total Jawaban Peserta Mengenai Materi dan Metode Pembelajaran yang Disampaikan pada Workshop Pembelajaran Aktif Ekonomi Makro tahun 2011



Berdasarkan Grafik 2 dapat dilihat bahwa total nilai tertinggi dari penyelenggaraan workshop ini adalah peserta mendapatkan manfaat dari pedagogi yang disampaikan. Dengan mengumpulkan total nilai 273 penilaian peserta pada pelatihan ini masuk pada kategori sangat bermanfaat. Selanjutnya adalah pernyataan bahwa materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka di sekolah memperoleh total nilai 265 yang berarti masuk pada kategori materi yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan tugas mereka. Beberapa pernyataan lain juga masuk pada kategori yang sangat baik kecuali untuk tingkat pemahaman materi. Total nilai untuk tingkat pemahaman materi adalah 244 yang masuk pada kategori peserta paham atau menguasai materi ekonomi yang diberikan. Materi yang disajikan pada pelatihan ekonomi makro ini memang



sebagian besar diambil dari materi yang disusun oleh tim instruktur dari CEE Amerika Serikat. Terdapat kemungkinan materi ekonomi yang dimuat dalam kurikulum SMA di Amerika Serikat lebih banyak dibandingkan di Indonesia. Berdasarkan observasi di Pembroke High School Missouri Amerika Serikat pada tahun 2010, siswa disana mempelajari ekonomi dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Meskipun sebagian besar diambil dari pelatihan yang diselenggarakan oleh CEE Amerika Serikat, tim instruktur dari PPPE-UNRI melakukan penyesuaian dengan kurikulum SMA. Namun tidak semua yang ada pada kurikulum SMA dapat diakomodir. Sejalan dengan pernyataan ini, masukan dan saran dari peserta secara terbuka mengharapkan agar materi disesuaikan dengan kurikulum sekolah di Indonesia, ada yang menginginkan materi disederhanakan, sementara yang lain menginginkan materi lebih diperdalam. Selain itu sebagian kecil merasa waktu penyampaian materi diperpanjang agar mereka lebih paham. Terdapatnya perbedaan dalam pemahaman materi dapat disebabkan oleh adanya perbedaan asal daerah peserta, pengalaman mengajar, sumber-sumber informasi, kesempatan pelatihan, keaktifan MGMP, dan sebagainya sehingga menimbulkan perbedaan dalam memahami materi yang diberikan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, PPPE-UNRI juga menjalin kerjasama dengan perbankan syariah untuk menambahkan materi perbankan syariah. Sebagian peserta sangat mengapresiasi kerjasama ini karena topik mengenai perbankan syariah juga sudah mulai diajarkan di SMA. Secara keseluruhan, 79 persen responden menyatakan materi yang diberikan bagus, dapat menambah wawasan dan pemahaman.

Sejak tahun 2004, PPPE-UNRI telah melakukan setidaknya 10 kali pelatihan sejenis baik yang berupa workshop selama lima hari maupun yang berupa briefing untuk satu hari. Dalam beberapa kali penyelenggaraan workshop, peserta diberi kesempatan untuk membuat laporan mengenai penerapan di kelas apa yang telah mereka dapatkan dari workshop. Hasil penelitian dari Kartikowati (2011) menemukan bahwa guru-guru ekonomi di Propinsi Riau melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar dengan cara menggunakan strategi pembelajaran aktif. Berdasarkan laporan 32 peserta program *follow-up* setelah mengikuti kegiatan workshop diketahui bahwa guru mampu berinovasi dalam proses pembelajaran ekonomi dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif dan penerapan model-model pembelajaran yang lebih

melibatkan partisipasi siswa. Proses pembelajaran aktif berlangsung menyenangkan, interaktif, dan siswa lebih bersemangat. Selain tujuan belajar tercapai, kompetensi sosial siswa lebih tereksplorasi, dan muncul sikap *positive interdependence*.

Guru yang profesional, akan memiliki dampak positif dalam beberapa hal lain selain terhadap prestasi siswa. Hasil penelitian Abdullah, Samupwa, dan Alzaidiyeen (2009) menemukan bahwa guru dengan keahlian mengajar, tanggung jawab, keahlian sosial dan interpersonal, serta keahlian komunikasi yang tinggi memiliki dampak positif terhadap perilaku kerja guru di sekolah. Sementara hanya keahlian guru dan tanggung jawab yang memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Temuan ini menyatakan bahwa kinerja guru dapat ditingkatkan ketika guru sangat terlatih dengan keahlian mengajarnya dan tanggung jawabnya. Temuan lain dari penelitian ini adalah guru dengan keahlian mengajar, keahlian komunikasi, keahlian sosial dan interpersonal, serta rasa tanggung jawab dapat meningkatkan keefektivan organisasi. Ketika guru memiliki rasa percaya diri yang tinggi, akan meningkatkan dampak keahlian mengajarnya terhadap kinerja dan keefektivan organisasi, sementara dampak rasa tanggung jawab terhadap keefektivan organisasi juga akan semakin tinggi pada guru yang memiliki rasa percaya diri tinggi. Tabak and Reiser (2008) melaporkan bahwa guru yang sudah terlatih dan mempersiapkan diri dengan baik lebih efektif di kelas dan memiliki dampak terbesar pada pembelajaran siswa. Para guru melaporkan bahwa semakin banyak mereka meluangkan waktu untuk aktivitas pengembangan profesional, semakin besar kemungkinan mereka telah meningkatkan instruksi mereka (Levin and Wadmany, 2008). Dua faktor penting yang mempengaruhi dampak pengembangan profesional dalam mengajar yang dikemukakan oleh Lotter, Harwood and Bonner (2007) dalam Owolabi (2012) adalah tingkat dimana guru merasa pengembangan profesional mereka terkait dengan aktivitas program lain di sekolah dan apakah aktivitas pengembangan profesional diikuti oleh aktivitas di sekolah.

#### **D. PRIORITAS**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pencapaian tujuan tersebut akan menjadi lebih mudah jika berbagai faktor pendukung dilakukan secara bersama.

Desentralisasi di satu sisi dapat meningkatkan mutu pendidikan. Namun tidak dipungkiri ada sisi negatif dari diterapkannya desentralisasi pendidikan. Melalui makalah ini, diharapkan pemerintah dan pihak yang berwenang dapat mengoptimalkan sisi positif desentralisasi dan meminimalkan sisi negatifnya. Adanya kewenangan mengelola dana sebagai bagian dari desentralisasi membuat pemerintah daerah dapat lebih berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya. Keleluasaan mengelola dana membuat penyelesaian masalah di daerah, dan bahkan mencakup daerah terpencil yang barangkali luput dari perhatian pemerintah pusat, dapat lebih tepat sasaran. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah secara tidak langsung terpacu untuk memajukan pendidikan di daerahnya agar dapat bersaing dengan daerah lain dalam kancah nasional. Setidaknya, setiap tahun akan dilakukan analisis perbandingan jumlah kelulusan siswa secara nasional. Belum lagi pada acara-acara tertentu yang mengadakan kompetisi antar siswa dimana keberhasilan dan prestasi menjadi pemenang dalam setiap kompetisi akan mengharumkan nama pemerintah daerahnya. Keberhasilan pendidikan di suatu daerah dapat menjadi catatan positif bagi pemerintah daerah dimata pemerintah pusat.

Peningkatan mutu pendidikan pada sisi lain dapat dilakukan melalui peningkatan profesionalisme guru. Tidak diragukan lagi bahwa pelatihan dapat meningkatkan profesionalisme guru. Dengan desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana untuk pelatihan secara reguler. Pelatihan sangat dikembangkan mengingat berbagai perubahan yang sangat cepat membutuhkan penyesuaian-penyesuaian baik dari sisi kemampuan materi, pedagogi, maupun penguasaan teknologi agar pencapaian tujuan pendidikan menjadi optimal. Adanya kerjasama kemitraan dengan lembaga asing dapat menjadi partner pemerintah daerah dalam mengembangkan pelatihan-pelatihan bagi guru. Banyak manfaat diperoleh dengan adanya kerjasama ini. Tidak hanya dari sisi pendanaan, tetapi juga dari sisi perkembangan materi dan pedagogi yang akan menambah wawasan dan variasi metode pembelajaran bagi guru untuk diterapkan di kelas. Berdasarkan analisis dari penyelenggaraan workhop tahun 2010 dan 2011, diketahui bahwa pelatihan yang diselenggarakan oleh CEE bekerjasama dengan PPPE-UNRI sangat bermanfaat bagi perkembangan guru-guru di Riau. Namun, adanya perubahan kebijakan dari pihak CEE

membuat kegiatan serupa tidak dapat lagi diselenggarakan pada tahun 2012 ini. Padahal, beberapa peserta secara aktif menyampaikan aspirasi untuk diselenggarakan kembali pelatihan untuk peningkatan materi dan pedagogi mereka. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk mencari dan menjalin kerjasama dengan lembaga asing agar para guru dapat meningkatkan profesionalisme mereka yang selanjutnya akan meningkatkan mutu pendidikan.✧

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G., Samupwa, A. M., & Alzaidiyeen, N. J., 2009. The Effects of Teacher Training Programme on Teachers' Productivity in Caprivi Region, Namibia *International Journal of African Studies*, Issue 2, pp.14-21
- Furlong, J., Barton, L., Miles, S., Whiting, C., & Whitty, G. 2000. *Teacher Education in Transition, Re-forming Professionalism?*, Philadelphia, Open University Press.
- Gibbs, G., & Coffey, M., 2004. The Impact of Training of University Teachers on Their Teaching Skills, Their Approach to Teaching and the Approach to Learning of Their Students, *The Institute for Learning and Teaching in Higher Education and SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi)*, Vol 5(1): 87–100.
- Goldhaber, D. D., & Brewer, D. J., 1996. Evaluating the Effect of Teacher Degree Level on Educational Performance, *Developments in School Finance*, 197-210.
- Harahap, H. 2012. Pendidikan dan Permasalahannya, (Online), (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/02/03/pendidikan-dan-permasalahannya/>), diakses 3 Juni 2012).
- Hodkinson, P., 1997. Neo-fordism and Teacher Professionalism, *Teacher Development: An international journal of teachers' professional development*, 1:1, 69-82
- Kartikowati, Rr. S. 2011. Active Learning Guru Ekonomi di Propinsi Riau, *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.3, 521-527.
- Levin, T. & Wadmany, R. 2008. Teachers' Views on Factors Affecting Effective Integration of Information Technology in the Classroom: Developmental Scenery. *Journal of Technology and Teacher Education*, 16 (2), 233-263.

- McGinn, N., & Welsh, T. 1999. Decentralization of Education: Why, When, What, and How, (Online), ([http://www.mp.gov.rs/resursi/dokumenti/dok222-eng-IIEP\\_decentralizacija\\_obrazovanja.pdf](http://www.mp.gov.rs/resursi/dokumenti/dok222-eng-IIEP_decentralizacija_obrazovanja.pdf), diakses 4 Juni 2012).
- Muhidin, S.A. *Desentralisasi Pendidikan*, (Online), (<http://sambasalim.com/pendidikan/desentralisasi-pendidikan.html>, diakses 4 Juni 2012).
- Mustaming, 2011. *Filasafat: Desentralisasi Pendidikan di Indonesia*, (Online), (<http://rsbikaltim.blogspot.com/2011/12/filasafat-desentralisasi-pendidikan-di.html>, diakses tanggal 23 Juni 2012).
- Nasser-Ghodsi, N. 2006. *What is the Effect of Educational Decentralization on Student Outcomes in Egypt? An Analysis of Egypt's Education Reform Program*, (Online), ([http://economics.stanford.edu/files/Theses/Theses\\_2006/Nasser-Ghodsi.pdf](http://economics.stanford.edu/files/Theses/Theses_2006/Nasser-Ghodsi.pdf), diakses 1 Juni 2012).
- Nurullah, A. & Hafidzoh, S.M. 2012, *Mendesain Ulang Desentralisasi Pendidikan*, (Online), (<http://www.jurnas.com/halaman/6/2012-06-09/211714>, diakses 25 Juni 2012).
- Owolabi, T. 2012. Characteristic of Professional Development and Impact of Training on Science Teachers' Classroom Practices, *Universal Journal of Education and General Studies*, Vol. 1 (5), 119-125.
- Samosir, M. 2008. *The Effects of Decentralization on Education in Indonesia: Education for All?*, (Online), (<http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=15161>, diakses 2 Juni 2012).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan dosen